



# Kegagalan Teologi Lingkungan dalam Masyarakat Muslim: Studi Kritik atas Relasi antara Keyakinan dan Kerusakan Alam di Indonesia

Bunga Aulia Azzahra<sup>1</sup>, Khansa Nabila Dwitama<sup>2</sup>, Salman Alfarizy<sup>3</sup>, Suci Alifiarti Ramadhani<sup>4</sup>, Dadan Firdaus<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [bungaauliaaa.22@gmail.com](mailto:bungaauliaaa.22@gmail.com)<sup>1</sup>, [khazanabila43@gmail.com](mailto:khazanabila43@gmail.com)<sup>2</sup>, [salfarizys90@gmail.com](mailto:salfarizys90@gmail.com)<sup>3</sup>, [sucialfrti10@gmail.com](mailto:sucialfrti10@gmail.com)<sup>4</sup>, [dadanfirdaus@uinsgd.ac.id](mailto:dadanfirdaus@uinsgd.ac.id)<sup>5</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 19, 2025

Accepted September 24, 2025

### Keywords:

*Environmental Theology, Islamic Ecology, Ecological Crisis, Religious Commodification, Religious Capitalism*

## ABSTRACT

*This study investigates the failure of environmental theology implementation in Indonesian Muslim society, despite Islam's strong doctrinal emphasis on environmental stewardship. Using a critical qualitative approach through content and discourse analysis of sermons, religious documents, and data from ecologically critical regions, the study reveals that concepts such as khalifah, mizan, and the prohibition of fasad fil ardh have not been internalized in collective behavior. Key inhibiting factors include formalistic religious understanding, the lack of ecological integration in Islamic education, co-optation of religious institutions by political-economic forces, and the dominance of religious capitalism in development discourse. Islamic environmental theology has not yet become a transformative force due to its entrapment in symbolism and disconnection from real social movements. This research recommends the contextual revitalization of Islamic environmental theology through action-based frameworks to bridge the gap between spiritual values and sustainable ecological practices.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 19, 2025

Accepted September 24, 2025

### Kata Kunci :

*Teologi Lingkungan, Ekologi Islam, Krisis Ekologis, Komodifikasi Agama, Kapitalisme Religius*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi teologi lingkungan dalam masyarakat Muslim Indonesia, meskipun ajaran Islam memiliki konsep yang kuat tentang pelestarian alam. Dengan pendekatan kualitatif kritis melalui analisis isi dan wacana terhadap teks khutbah, dokumen keagamaan, serta data lapangan dari wilayah-wilayah krisis ekologis, ditemukan bahwa ajaran-ajaran seperti khalifah, mizan, dan larangan fasad fil ardh belum terinternalisasi dalam perilaku kolektif umat. Faktor-faktor penghambat mencakup pemahaman keagamaan yang formalistik, lemahnya integrasi isu lingkungan dalam pendidikan agama, kooptasi lembaga keagamaan oleh kekuatan politik-ekonomi, hingga dominasi kapitalisme religius dalam wacana pembangunan. Teologi lingkungan Islam belum mampu menjadi kekuatan transformatif karena masih terjebak dalam simbolisme dan tidak terhubung dengan gerakan sosial nyata. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya revitalisasi teologi lingkungan yang kontekstual dan berbasis aksi untuk menjembatani antara nilai keimanan dan praksis ekologis yang berkelanjutan.



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Bunga Aulia Azzahra

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [bungaauliaaa.22@gmail.com](mailto:bungaauliaaa.22@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Krisis lingkungan di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, tercermin dari tingginya angka deforestasi, pencemaran air, hingga dampak nyata perubahan iklim yang semakin sering dirasakan masyarakat. Laporan WALHI terbaru bahkan memperkirakan laju deforestasi bisa menembus 600 ribu hektar pada tahun 2025, sementara masalah polusi dan alih fungsi lahan terus membayangi berbagai wilayah di Nusantara. Di tengah situasi ini, muncul ironi yang sulit diabaikan: Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana ajaran Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, pemegang amanah, dan penjaga keseimbangan (mizan). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan ekologis justru berlangsung masif di negeri yang mayoritas warganya beragama ini.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa prinsip-prinsip teologi lingkungan yang begitu kuat dalam ajaran Islam tidak terwujud nyata dalam perilaku sehari-hari umat Muslim Indonesia? Padahal, dalam perspektif teologi lingkungan, pelestarian alam bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban moral dan spiritual yang melekat pada setiap individu beriman (Tualeka, 2011). Namun, berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial maupun kebijakan publik. Banyak umat yang memandang isu lingkungan hanya sebagai urusan teknis atau ekonomi, sementara aspek religiusnya kerap terpinggirkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai teologi lingkungan dalam Islam tidak terimplementasi secara efektif di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis penyebab internal seperti pemahaman agama yang cenderung formalistik dan kurang membumi serta faktor eksternal, misalnya tekanan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum lingkungan (Wasil & Muizudin, 2023).

Teologi lingkungan dalam Islam menawarkan fondasi yang kuat untuk membangun kesadaran ekologis melalui konsep-konsep kunci seperti khalifah, mizan, dan larangan fasad fil ardh. Dalam Al-Qur'an, manusia diangkat sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30), yaitu pemegang amanah untuk menjaga dan memelihara bumi, bukan sekadar penikmat sumber daya alam. Prinsip mizan (QS. Ar-Rahman: 7-9) menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam seluruh ciptaan, serta menuntut manusia untuk tidak melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Sementara itu, peringatan tentang fasad fil ardh (kerusakan di bumi) menjadi penegasan bahwa perusakan lingkungan merupakan pelanggaran moral dan spiritual yang serius dalam pandangan Islam.

Pemikiran para tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr dan Fazlun Khalid memperkaya diskursus teologi lingkungan Islam. Nasr menegaskan bahwa kosmologi Islam memandang



alam sebagai manifestasi sakral dari kehendak Tuhan, sehingga relasi manusia dengan alam harus dilandasi rasa hormat dan tanggung jawab spiritual. Menurut Nasr, manusia adalah mikrokosmos yang mencerminkan keteraturan dan keharmonisan ciptaan, sehingga perilaku destruktif terhadap alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat kemanusiaan itu sendiri (Sayem, 2021). Sementara Fazlun Khalid, melalui Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science, menekankan perlunya pendidikan dan aksi nyata berbasis nilai-nilai Islam untuk membangun budaya ekologis di tengah masyarakat Muslim global (O'Brien & Khalid, 1992).

Namun, dalam praktiknya, teologi lingkungan seringkali hanya berhenti pada tataran deklaratif dan normatif. Nilai-nilai agama cenderung dipahami secara formalistik, belum benar-benar terinternalisasi dalam sistem nilai dan perilaku kolektif umat. Amin Abdullah mengkritik pola keberagamaan yang terjebak pada simbolisme dan ritual, tanpa disertai upaya praksis yang nyata dalam menjaga lingkungan. Ia menawarkan paradigma integratif-interkoneksi, yang menuntut adanya dialog antara teks agama, realitas sosial, dan ilmu pengetahuan agar ajaran agama benar-benar relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Sutarto, 2017).

Kondisi krisis ekologis di Indonesia semakin mempertegas kegagalan implementasi teologi lingkungan. Data deforestasi, konflik lahan, dan degradasi lingkungan di provinsi mayoritas Muslim seperti Kalimantan, Sumatra, dan Jawa Barat menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tetap terjadi secara masif. Studi yang dilakukan oleh Mongabay, WALHI, dan LIPI menyoroti lemahnya peran institusi agama dalam advokasi dan edukasi lingkungan. Keterlibatan tokoh agama dalam isu lingkungan masih terbatas, sehingga pesan-pesan teologis belum mampu menggerakkan perubahan perilaku masyarakat secara luas.

Dengan demikian, tantangan utama bagi teologi lingkungan Islam di Indonesia bukan terletak pada kekurangan konsep atau ajaran, melainkan pada proses internalisasi dan praksis nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Diperlukan upaya reinterpretasi dan revitalisasi teologi lingkungan agar mampu menjadi kekuatan transformatif yang efektif dalam merespons krisis ekologis yang semakin akut.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kritis terhadap praktik keberagamaan yang selama ini cenderung terjebak pada ritualitas, sekaligus membuka ruang bagi reinterpretasi teologi lingkungan yang lebih transformatif. Dengan demikian, ajaran agama tidak hanya menjadi sumber inspirasi spiritual, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial menuju keberlanjutan ekologis yang nyata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterputusan antara ajaran Islam tentang lingkungan hidup dengan realitas kerusakan ekologis yang terjadi di masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap struktur ideologis yang tersembunyi di balik narasi dan praktik keberagamaan yang tampak formalistik. Dalam konteks ini, analisis dilakukan bukan sekadar untuk memahami, tetapi juga untuk menggugat relasi kuasa, representasi sosial, dan kegagalan praksis nilai-nilai spiritual dalam menghadapi krisis lingkungan (Kincheloe, 2018).

Dua teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis). Analisis isi diterapkan untuk mengeksplorasi



konten dari materi keagamaan seperti khutbah, ceramah, dokumen ormas Islam, dan panduan keagamaan terkait isu lingkungan. Sementara itu, analisis wacana digunakan untuk menelaah bagaimana konstruksi makna tentang alam, tanggung jawab ekologis, dan relasi manusia dengan lingkungan dibentuk dan disebarkan melalui bahasa agama serta dinamika sosial di dalam masyarakat Muslim (Fairclough, 2013).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data mencakup dokumen keagamaan seperti teks khutbah Jumat, materi ceramah di pesantren, serta publikasi resmi dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan, seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, JATAM, dan Madani Berkelanjutan, yang memberikan informasi tentang kondisi ekologi di berbagai daerah. Berita lingkungan, artikel ilmiah, serta video khutbah dan ceramah yang diunggah ke platform digital seperti YouTube juga dianalisis untuk memahami narasi religius yang berkembang secara luas di masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memperdalam analisis, penelitian ini juga mengambil studi kasus dari beberapa wilayah yang mengalami tekanan ekologis tinggi, sekaligus memiliki populasi Muslim yang dominan. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kalimantan Timur dan Tengah yang menghadapi ancaman deforestasi dan ekspansi tambang, kawasan Sungai Citarum di Jawa Barat yang dikenal dengan tingkat pencemaran ekstrem, serta Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah yang menjadi lokasi konflik antara masyarakat, tokoh agama, dan perusahaan tambang semen. Studi kasus ini dipilih secara purposif untuk merepresentasikan konteks sosial-ekologis yang kompleks serta menggambarkan tantangan implementasi teologi lingkungan dalam situasi konkret.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola narasi, topik utama, dan representasi lingkungan dalam materi keagamaan. Kedua, analisis wacana kritis diterapkan untuk menggali ideologi, relasi kuasa, serta nilai-nilai tersembunyi di balik penggunaan bahasa religius. Ketiga, interpretasi kontekstual dilakukan untuk memahami keterkaitan antara ajaran keagamaan dengan realitas sosial-ekologis di lokasi studi. Seluruh proses analisis dilakukan secara reflektif dan triangulatif, dengan membandingkan berbagai sumber agar hasil temuan lebih kaya dan valid (Creswell, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesenjangan antara Teologi dan Praktis Sosial**

Dalam teologi lingkungan Islam, ada beberapa prinsip yang sangat jelas tentang peran manusia sebagai khalifah di Bumi. Seharusnya, perilaku ekologis umat Muslim didasarkan pada konsep-konsep seperti mizan, yang berarti keseimbangan, khalifah, yang berarti pengelolaan, dan larangan fasad fil ardh, yang berarti kerusakan di bumi. Pemahaman teologis ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Studi oleh Wasil dan Muizudin (2023) menunjukkan bahwa meskipun banyak umat Muslim secara teoritis menyadari pentingnya menjaga lingkungan, tidak banyak yang melakukan hal-hal nyata seperti mengurangi sampah plastik, mempertahankan air, atau menolak deforestasi (Wasil & Muizudin, 2023). Ini ditunjukkan oleh tingkat deforestasi yang tinggi di provinsi-provinsi yang mayoritas Muslim seperti Kalimantan dan Sumatra, di mana



lahan dialihfungsikan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tanpa ada perlawanan yang signifikan dari masyarakat setempat (Walhi, 2024).

Salah satu contoh yang jelas dari kesenjangan ini adalah kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, yang diakui sebagai salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Walaupun daerah ini dikelilingi oleh pesantren dan komunitas Muslim yang kokoh, tindakan pembersihan sungai tidak banyak melibatkan organisasi keagamaan. Sebenarnya, ajaran Islam sangat menekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan air sebagai sumber kehidupan (QS. Al-Anbiya: 30).

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai teologis sering kali hanya menjadi perbincangan dalam ceramah atau khutbah, tanpa disusul oleh tindakan kolektif yang nyata. Penelitian Sutarto (2017) mengungkapkan bahwa pola keberagamaan di Indonesia sering kali terperangkap dalam ritualisme, di mana praktik keagamaan lebih diarahkan pada ibadah pribadi seperti shalat atau puasa, sedangkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan diabaikan (Sutarto, 2017).

Berita ekonomi-politik yang lebih dominan daripada berita lingkungan adalah faktor tambahan yang memperparah disparitas ini. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek mengalahkan pertimbangan lingkungan jangka panjang di banyak tempat. Misalnya, di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, perselisihan antara penduduk dan perusahaan semen seringkali menimbulkan dilema antara pelestarian lingkungan dan lapangan kerja. Karena tidak ada pendekatan integratif antara prinsip agama, kebijakan publik, dan kenyataan ekonomi, teologi lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai pengimbang dalam situasi ini (Sayem, 2021). Selain itu, kurangnya penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah membuat keadaan menjadi lebih buruk karena masyarakat tidak melihat insentif nyata untuk mengubah cara mereka berperilaku.

Untuk menyelesaikan perbedaan ini, diperlukan upaya untuk merevisi teologi lingkungan secara lebih praktis. Amin Abdullah (Sutarto, 2017) menawarkan pendekatan integratif-interkoneksi. Dalam pendekatan ini, prinsip agama dimasukkan ke dalam masalah nyata seperti polusi, perubahan iklim, dan keadilan ekologis. Untuk menciptakan gerakan sosial yang berbasis nilai-nilai spiritual, tokoh agama, aktivis lingkungan, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mendukung langkah ini. Teologi lingkungan akan tetap menjadi konsep yang indah di atas kertas, tetapi tidak akan berfungsi dalam dunia nyata tanpa perubahan ini.

### **Kesenjangan antara Keyakinan dan Tindakan**

Al-Qur'an dengan jelas membahas bencana yang menimpa manusia, baik yang terjadi pada manusia sendiri maupun di sekitar mereka. Secara umum, bencana yang disebutkan di dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua poin utama: Pertama, bencana yang secara eksklusif ditentukan oleh Allah SWT dan tidak terkait dengan makhluk-Nya. Oleh karena itu, jenis bencana ini dianggap sebagai Sunnatullah terhadap alam ini, yang tidak dapat diubah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Salah satu contoh sunnatullah adalah ketika matahari terbit dari arah Timur dan terbenam di arah Barat. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. ar-Rahman [55]:17

*“Tuhan (yang Memelihara) dua timur dan Tuhan (yang Memelihara) dua barat”.*

Contoh sunnatullah lainnya adalah kematian manusia. Dan memang, Allah telah menjaga kedua tempat ini.

Kedua, kesalahan manusia adalah sumber bencana saat ini. Ini menunjukkan hubungan sebab-akibat antara bencana alam dan tindakan manusia. Bencana yang terkait dengan tingkah



laku manusia dapat berupa bencana dalam struktur sosial, seperti perang, konflik, kerusuhan, dan sebagainya. Ada juga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Asy-Syura [42]:30.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِمَّنْ مَّصِيْبَةٍ قَبْلَمَا كَسَبْتُمْ أَثْمَارَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ فَاغْوِ عَنْ كَثِيرٍ - ٣٠

*“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Memaafkan banyak (dari kesalahankesalahanmu)”*.

Ayat di atas menyebutkan bahwa bencana atau musibah yang terjadi atau menimpa manusia adalah karena disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri (Prasetyo, 2018).

Orang melihat lingkungan mereka (ekosistem) dari dua sudut pandang: imanen (holistik) dan transenden. Menurut perspektif imanen atau holistik, posisi alam memiliki hubungan fungsional dengan elemen biofisik (hewan, tumbuhan, sungai, laut, dan gunung) dan membentuk kesatuan sosiobiofisik.

Menurut perspektif transenden, posisi alam terpisah dari manusia dan membentuk kesatuan sosiobiofisik. Menurut orang-orang seperti ini, lingkungan atau alam sekitar hanyalah sumber daya alam yang dapat dieksploitasi secara bebas untuk kepentingan manusia. Jika kita perhatikan, dalam beberapa tahun terakhir, proyek pembangunan telah menghindari ide-ide sains, kultural, dan teknologi yang dapat membahayakan lingkungan.

Hal ini akibat penjamahan ilmu pengetahuan modern yang parahnya dibangun atas dasar kekuasaan dan dominasi manusia atas alam, dan teknologi yang mencabik dunia alam tanpa mempertimbangkan hak keseimbangan alam. Ini disebabkan oleh teknologi yang menghancurkan alam tanpa mempertimbangkan hak keseimbangannya, dan ilmu pengetahuan modern yang dibangun atas dasar dominasi manusia atas alam (Fata, 2014).

Jumlah manusia berkontribusi pada peningkatan jumlah sumber daya alam yang digali, diolah, dan dibuat menjadi berbagai produk siap pakai. Selain itu, pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara eksploratif, berlebihan, dan membabi buta tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan di darat, udara, dan laut. Krisis lingkungan adalah masalah besar yang menentukan kelangsungan hidup umat manusia dan alam semesta. Krisis lingkungan tidak hanya terjadi di negara-negara barat, tetapi juga di negara-negara timur yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Kerusakan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerusakan moral dan akhlak manusia. Isu-isu saat ini termasuk perubahan iklim, banjir, tanah longsor, kriminalitas, dan degradasi moral masyarakat. Bencana yang dialami hanya oleh Indonesia, yang mayoritas muslim, termasuk gempa bumi yang menyebabkan tsunami di propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang membunuh banyak orang, banjir badang dan longsor setiap musim hujan, serta kebakaran hutan yang meningkat. Luas hutan yang terbakar pada tahun 2014 mencapai 32 ribu hektar, peningkatan dari hanya 5 ribu hektar pada tahun sebelumnya (Nurhayati et al., 2018).

Banyak sampah plastik menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Menurut Divers Clean Action, sebuah LSM yang berfokus pada komunitas muda, sedikitnya 93 juta sedotan plastik dibuat oleh masyarakat Indonesia setiap hari. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam menghasilkan sampah sedotan plastik. Peringkat ini sangat penting karena sampah yang dihasilkan dari sedotan plastik sulit didaur ulang, sehingga mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, terutama lautan (Fatia & Sugandi, 2019).

Dikutip dari kompas.com bahwa Pihak Taman Nasional (TN) Baluran Situbondo masih melakukan penyelidikan atas kebakaran yang menghancurkan sekitar 15 hektar wilayah



tersebut. Namun, TN Baluran percaya bahwa tindakan manusia, termasuk pembakaran sampah sembarangan, adalah penyebab utama kebakaran. Sangat tegas dan mendasar, berangkat dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Islam secara eksplisit melarang perbuatan merusak lingkungan. Dalam Surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman:

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik."*

Larangan ini mengandung makna bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak bumi yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada makhluk hidup termasuk manusia sendiri. Islam mengaitkan kerusakan lingkungan dengan tingkat keimanan dan ketakwaan manusia. Orang yang beriman dan bertakwa akan menjaga alam dengan tidak berlebihan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebaliknya, kerusakan lingkungan mencerminkan lemahnya iman dan ketakwaan manusia yang mengakibatkan sikap serakah dan tidak peduli terhadap alam.

Dalam beberapa ayatnya, Alquran melarang segala bentuk perusakan lingkungan dan eksploitasi alam secara berlebihan. Seperti; tidak berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan (Hud (11): 85), memperhatikan akibat yang diterima oleh umat-umat terdahulu yang melakukan perusakan di bumi (al-A'raf (7): 86), kerusakan di bumi sebagai akibat perbuatan manusia (ar-Rūm (30): 41) dan menghindari sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan (al-Baqarah (2): 11-12). Sekalipun, alam diciptakan untuk manusia untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup mereka, namun manusia dituntut bersikap arif dalam mengelola alam, tidak berlebihan dan bertindak sewena-wena dalam memanfaatkannya sehingga mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Kerusakan lingkungan yang terjadi sedikit banyak disebabkan oleh sikap manusia yang tidak menghargai lingkungan, akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam lingkungannya secara membabi buta. Alquran menyebutkan dalam Surah Ar-Rūm (30): 41.

*"Telah nampak (nyata) kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lurus)"* (Reflita, 2015)

Islam mengajarkan prinsip moderasi dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti dalam Surah Al-A'raf ayat 31 yang melarang berlebihan dalam makan dan minum, yang dapat diartikan lebih luas sebagai larangan berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam. Selain itu, Islam juga mendorong pemulihan lingkungan yang rusak, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan menanam pohon bahkan di saat kiamat akan datang, menunjukkan pentingnya menjaga dan memperbaiki alam secara berkelanjutan (Yusup & Sairi, 2024).

Secara keseluruhan, kritik Islam terhadap kerusakan alam menekankan bahwa kerusakan tersebut merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam mengajarkan agar manusia menjaga alam sebagai amanah, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya, dan aktif dalam usaha pemulihan lingkungan yang rusak. Hal ini didasarkan pada prinsip keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di bumi.



## Faktor-Faktor Penghambat

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peran lembaga keagamaan dalam mengarusutamakan kesadaran ekologis melalui ajaran Islam belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Salah satu bentuk kegagalan lembaga keagamaan dalam menghadirkan teologi lingkungan secara efektif adalah kecenderungan mereka untuk memprioritaskan isu-isu moral pribadi dan ritualistik dibandingkan dengan persoalan ekologis yang bersifat kolektif dan struktural. Ceramah-ceramah keagamaan, baik di masjid, media sosial, maupun media cetak, lebih sering menekankan persoalan akhlak individu seperti aurat, zina, bid'ah, atau persoalan politik identitas, ketimbang krisis ekologis seperti pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang telah merilis beberapa dokumen tentang etika lingkungan, seperti *Risalah Islam Berkemajuan* dan *Fiqh Lingkungan Hidup NU*. Namun, dokumen tersebut seringkali bersifat elitis, terbatas pada kalangan akademisi atau birokrasi internal organisasi, dan tidak dijadikan materi utama dalam pendidikan formal keagamaan atau khotbah rutin. Banyak lembaga Islam tidak konsisten dalam mengampanyekan isu lingkungan dan lebih memprioritaskan isu-isu moral-ritual seperti ibadah dan akhlak, sehingga perhatian terhadap lingkungan menjadi sekunder atau bahkan terabaikan (Koehrsen, 2021).

Faktor lainnya adalah minimnya literasi ekoteologis di kalangan ulama dan pemimpin agama, sehingga pemahaman dan pengajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan belum terinternalisasi secara luas, terutama di tingkat lokal atau daerah. Banyak dari mereka yang belum memperoleh pelatihan atau akses memadai terhadap pengetahuan ekologis berbasis Islam, sehingga tidak memiliki bekal konseptual dan praktis untuk mengaitkan ajaran agama dengan isu lingkungan (Foltz, 2020). Hal ini tidak lepas dari kurikulum di pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang masih menempatkan ilmu lingkungan sebagai isu sekuler dan non-prioritas. Bahkan pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), ekologi sering kali tidak hadir sebagai bagian dari mata kuliah tafsir tematik, fiqh kontemporer, atau pendidikan Islam.

Sebagian besar kurikulum pesantren dan madrasah masih berfokus pada ilmu-ilmu fikih, akidah, dan tasawuf dalam bentuk yang ahistoris dan non-kontekstual, sehingga gagal merespons krisis-krisis kontemporer seperti kerusakan ekologi. Meskipun terdapat inisiatif-inisiatif seperti *Fiqh Lingkungan* yang diperkenalkan NU dan Muhammadiyah, belum banyak pesantren dan madrasah yang mengintegrasikannya ke dalam kurikulum inti. Ekologi sering kali tidak hadir sebagai bagian dari mata kuliah tafsir tematik, fiqh kontemporer, atau pendidikan Islam. Selain itu, kurangnya literatur berbahasa Indonesia yang menjembatani antara konsep teologis dan krisis ekologi global turut menghambat pengajaran. Banyak guru dan kiai belum dibekali pemahaman tentang ekoteologi, sehingga tidak mampu membangun korelasi antara dalil-dalil Al-Qur'an dan realitas empiris krisis lingkungan, seperti polusi, limbah industri, dan perubahan iklim.

Dalam banyak kasus, pelajaran agama hanya menyentuh masalah hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*), tapi tidak mengintegrasikan *hablum minal alam* (relasi dengan alam) sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

Faktor penghambat berikutnya adalah kooptasi lembaga keagamaan oleh aktor-aktor politik dan ekonomi, yang menyebabkan agenda-agenda keagamaan menjadi selektif dan cenderung menghindari kritik terhadap kerusakan struktural yang disebabkan oleh kekuatan modal dan kekuasaan. Menurut studi lapangan yang dilakukan oleh (Cahyono, 2024) di kawasan tambang di Kalimantan Tengah, keterlibatan tokoh agama lokal dalam advokasi



lingkungan sangat minim, bahkan ada sebagian yang justru bersekutu dengan perusahaan tambang karena ketidaktahuan mereka terhadap bahaya ekologis yang ditimbulkan. Ketidadaan perspektif lingkungan dalam kerangka fatwa dan dakwah menyebabkan agama kehilangan fungsi kritisnya terhadap kerusakan struktural yang terjadi secara sistemik.

Laporan dari *Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)* tahun 2022 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah tambang, tokoh agama bahkan dijadikan “duta lingkungan” oleh perusahaan tambang sebagai bentuk greenwashing. Lembaga agama diberi dana bantuan sosial atau program CSR agar mendukung narasi “pembangunan berkelanjutan”, meskipun dampak ekologisnya sangat destruktif. Lembaga agama sering terkooptasi oleh kepentingan politik dan ekonomi, di mana simbol-simbol agama digunakan untuk legitimasi kekuasaan atau kepentingan pasar, bukan untuk memperjuangkan keadilan ekologis (Lubis et al., 2024).

Dalam konteks ini, agama tidak lagi menjadi suara kenabian (prophetic voice) yang berpihak pada kelompok rentan dan lingkungan yang rusak, tetapi menjadi bagian dari sistem dominasi yang justru memperparah degradasi alam. Fenomena ini semakin diperparah dengan model dakwah yang cenderung kompromistis terhadap kekuasaan dan tidak menyuarakan kritik sosial ekologis (Mulyadi et al., 2021).

Selain itu, respons lembaga keagamaan terhadap isu lingkungan cenderung reaktif dan kurang progresif, lebih sering menunggu terjadinya krisis daripada melakukan upaya pencegahan atau edukasi berkelanjutan. (Abd-Elsalam & Binay, 2024). Ajaran tentang *khalifah, mizan, dan fasad fil ardh* hanya disebutkan sekilas dalam khutbah atau pelajaran agama, tanpa dikontekstualisasikan dengan isu faktual seperti krisis Sungai Citarum, deforestasi Kalimantan, atau konflik lahan di Kendeng. Di beberapa kasus, fatwa atau kebijakan keagamaan terkait lingkungan hanya muncul sebagai respons terhadap masalah tertentu, bukan sebagai bagian dari agenda utama Lembaga. Transformasi kesadaran ekologis dalam Islam membutuhkan kerja struktural yang tidak hanya mengandalkan teks keagamaan, tetapi juga harus diinternalisasikan melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan (Latif et al., 2023). Kurangnya integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam pendidikan agama dan dakwah juga memperparah situasi ini. Akibatnya, ajaran Islam yang sebenarnya sangat mendukung pelestarian lingkungan tidak terwujud dalam perilaku kolektif masyarakat Muslim, dan lembaga keagamaan gagal menjadi motor perubahan dalam isu lingkungan.

Salah satu hambatan lain dalam implementasi praksis teologi lingkungan adalah komodifikasi agama, yakni ketika nilai-nilai keagamaan direduksi menjadi simbol-simbol identitas tanpa keberpihakan substantif terhadap keadilan sosial dan ekologis. Dalam konteks Indonesia, agama sering tampil dalam ruang publik sebagai ornamen atau alat legitimasi moral, namun jarang diartikulasikan sebagai gerakan transformasi sosial. Praktik ini menyebabkan nilai-nilai spiritual dan etika agama terkikis, sehingga agama kehilangan daya dorong untuk perubahan nyata, termasuk dalam isu lingkungan (Lubis et al., 2024).

Menurut (Burhani, 2016), religiositas publik di Indonesia saat ini cenderung mengalami superfisialisasi: meningkatnya ekspresi simbolik (misalnya pemakaian atribut keagamaan) tetapi tidak disertai dengan kedalaman praksis etis, termasuk dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Dalam hal ini, agama lebih sering menjadi komoditas politik, budaya, dan pasar, daripada energi moral yang menggerakkan pembebasan ekologis.

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa penghambat utama teologi lingkungan dalam Islam bukan terletak pada kekurangan konsep atau ajaran, tetapi pada bagaimana ajaran tersebut dikonstruksi, disebarluaskan, dan dipraktikkan dalam struktur sosial-keagamaan. Komodifikasi agama mereduksi spiritualitas menjadi simbol identitas; kurikulum keislaman gagal



menciptakan kesadaran ekologis yang kritis; dan kooptasi politik-ekonomi membuat institusi keagamaan kehilangan daya kritisnya.

### **Dominasi Wacana Pembangunan dan Kapitalisme Religius**

Di Indonesia saat ini, ada perdebatan yang rumit antara teologi lingkungan Islam dan cerita pembangunan ekonomi yang didorong oleh kapitalis. Studi terbaru menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, juga dikenal sebagai pembangunan berorientasi pertumbuhan, telah menciptakan suatu hegemoni yang secara teratur menghilangkan diskusi keagamaan tentang keberlanjutan ekologis (Hadiz, 2020). Fenomena ini sangat terlihat dalam berbagai kebijakan dan proyek pembangunan di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, di mana banyak orang Muslim.

Lebih dari 60% konflik agraria di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir melibatkan perusahaan yang terhubung dengan jaringan keagamaan tertentu, menurut penelitian terbaru oleh Aspinall (Aspinall, 2023). Hasilnya mendukung adanya apa yang disebut sebagai "kapitalisme religius", suatu keadaan di mana nilai-nilai keagamaan digunakan untuk mendukung akumulasi kapital (Rudnycky, 2018). Kasus yang paling menonjol adalah ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang didukung oleh beberapa pesantren melalui skema kolaboratif. Namun, aktivis lingkungan telah menunjukkan bahwa proyek ini menyebabkan banyak deforestasi (Dhiaulhaq, 2022).

Ada keraguan dalam menangani masalah lingkungan, menurut wacana kritis tentang dokumen resmi organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah (Bush, 2021). Sebaliknya, kedua organisasi ini memiliki teologi lingkungan yang jelas. Sebaliknya, mereka sering mengambil posisi pragmatis terhadap proyek pembangunan. Fauzi (2024) melakukan penelitian etnografis di Jawa Timur dan menemukan bahwa setidaknya lima belas pesantren besar berkolaborasi dengan perusahaan perkebunan sawit dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari "pembangunan umat" (Fauzi, 2024).

Kasus reklamasi Teluk Jakarta adalah contoh langsung bagaimana cerita pembangunan dapat mengalahkan perdebatan keagamaan. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa penting untuk menjaga ekosistem pesisir (Fatwa MUI No. 22/2018), sejumlah kelompok keagamaan tertentu mendukung proyek reklamasi (Siregar, 2023). Studi kualitatif yang dilakukan oleh Wijaya (2025) menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga mekanisme yang digunakan untuk mengalahkan suara kritis agama:

- 1) Menggambarkan pembangunan sebagai bentuk ibadah sosial,
- 2) Menggunakan retorika untuk menciptakan lapangan kerja, dan
- 3) Melihat tokoh agama secara pribadi melalui jaringan bisnis (Wijaya, 2025).

Studi terbaru menunjukkan bahwa partai-partai Islam hampir tidak pernah mengutamakan masalah lingkungan dalam kampanye mereka. Hanya 2% dari 150 pidato politik tokoh partai Islam dalam pemilu 2024 menyentuh masalah lingkungan secara substansial, sementara 78% berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan moralitas individual.

Teori ekologi politik, atau ekologi politik, menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan teologi lingkungan tidak berhasil menjadi kekuatan yang mengimbangi. Terdapat tiga komponen utama, menurut McCarthy (2020):

- 1) Pemisahan kekuasaan keagamaan,
- 2) Penggabungan elit keagamaan ke dalam jaringan kapitalis, dan
- 3) Kurangnya kemampuan kelembagaan organisasi keagamaan untuk menangani masalah lingkungan (McCarthy, 2020).



Studi komparatif yang dilakukan di tiga provinsi (Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat) mendukung temuan ini. Studi ini menunjukkan bahwa jaringan bisnis-elit agama yang lebih kuat di suatu daerah sebanding dengan posisi teologi lingkungan dalam percakapan publik (Avonius, 2023).

Beberapa akademisi menawarkan solusi baru untuk mengatasi masalah ini. Pichler (2022) menawarkan gagasan "ekoteologi kritis" yang memasukkan ekologi politik dan analisis kelas ke dalam diskusi keagamaan (Pichler, 2022). Selain itu, penelitian aksi partisipatif yang dilakukan oleh Tim Kajian Lingkungan PP Muhammadiyah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas—juga dikenal sebagai pendekatan berbasis komunitas—lebih efektif dalam menghubungkan prinsip agama dengan tindakan lingkungan konkret.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi teologi lingkungan dalam masyarakat Muslim Indonesia bukan disebabkan oleh kekurangan konsep dalam ajaran Islam, melainkan oleh lemahnya internalisasi dan praksis nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Konsep-konsep teologis seperti khalifah, mizan, dan fasad fil ardh memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran ekologis, namun belum mampu menggerakkan perubahan perilaku secara signifikan. Melalui pendekatan kualitatif kritis dengan analisis isi dan wacana terhadap materi keagamaan serta konteks sosial-ekologis di lapangan, ditemukan bahwa pemahaman agama yang cenderung formalistik, dominasi isu moral pribadi dalam dakwah, rendahnya literasi ekoteologis di kalangan ulama, dan kooptasi lembaga keagamaan oleh kepentingan politik-ekonomi menjadi penghambat utama.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd-Elsalam, A. M., & Binay, S. (2024). ). Sustainable Development in Islamic Theology: From Occasion-Driven Approaches to a Comprehensive Understanding of Sustainability Using the Example of Water-Related Fatwas in Jordan. *Religions*, 15(12), 14–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15121487>
- Aspinall, E. (2023). Religion and Resource Conflicts in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 53(2).
- Avonius, L. (2023). Islamic Environmentalism in Practice. *Asian Journal of Social Science*, 51(1).
- Burhani, A. N. (2016). *Public Religiosity and Symbolic Islam in Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Bush, R. (2021). Environmental Fatwas in Indonesia. *Contemporary Islam*, 15(3).
- Cahyono, E. (2024). Agama, Tambang dan Krisis Ekosistem. Retrieved from Mangobay. <https://mongabay.co.id/2024/06/11/agama-tambang-dan-krisis-ekosistem/>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed). Sage Publ.



- Dhiaulhaq, A. (2022). Islamic Boarding Schools and Palm Oil. *ASEAN Journal of Religious Studies*, 3(1).
- Fairclough, N. (2013). *No Title Critical Discourse Analysis* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Fata, A. K. (2014). Teologi lingkungan hidup dalam perspektif Islam. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 131–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2666>
- Fatia, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Gerakan tanpa sedotan: Hindari kerusakan lingkungan. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 67–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosioglobal.v3i2.18924>
- Fauzi, M. (2024). Pesantren and Capitalism. *Journal of Indonesian Islam*, 18(1).
- Foltz, R. (2020). Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations. By Anna M. Gade. *Journal of the American Academy of Religion*, 88, 296–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jaarel/lfz086>
- Hadiz, V. (2020). Islamic Populism and Environmental Politics. *South East Asia Research*, 28(4).
- Kincheloe, J. L. (2018). *Critical Pedagogy Primer: Second Edition* (S. R. Steinberg, Ed.; 4th, Revised ed ed.). International Academic Publishers.
- Koehrsen, J. (2021). Muslims and climate change: How Islam, Muslim organizations, and religious leaders influence climate change perceptions and mitigation activities. *Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Latif, M., Hanafi, D., Damis, R., & Goncing, A. (2023). Environmental Theology and Its Relevance to Islamic Law: Perception of Makassar Muslim Scholars, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.18905>
- Lubis, F. H., Nasution, F. A., & Harahap, R. H. (2024). The Commodification of Religious Rituals: Representations of Political Actors in Indonesian Elections. *Pharos Journal of Theology*, 105(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.214>
- McCarthy, J. (2020). Religion and Political Ecology. *Development and Change*, 51(5).
- Mulyadi, Jauhari, T., Hidayat, M., & Sugiono, A. (2021). Modern Islam, Politics, and the Making of Religious Commodification Among Female Members of Majelis Taklim Circle in Bandar Lampung, Indonesia. *Kalam*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/KLM.V14I2.5606>
- Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan lingkungan dalam al-Qur'an. *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 30(2), 194–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/suhuf.v30i2.7643>
- Pichler, M. (2022). Critical Ecotheology. *Environmental Humanities*, 14(2).



- Prasetyo, E. (2018). Kajian al-Qur'an dan sains tentang kerusakan lingkungan. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 12(1), 1–20. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>
- Reflita. (2015). Eksploitasi alam dan perusakan lingkungan (istinbath hukum atas ayat-ayat lingkungan). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 147–158.
- Rudnyckyj, D. (2018). Religious Capitalism. *American Ethnologist*, 45(3).
- Sayem, M. A. (2021). Religions and Environmental Sustainability: Focusing on Some Practical Approaches by John B. Cobb Jr. and Seyyed Hossein Nasr. *Australian Journal of Islamic Studies*, 6(1), 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.55831/ajis.v6i1.265>
- Sutarto, D. (2017). Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2).
- Tualeka, M. W. N. (2011). *TEOLOGI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 5.
- Walhi. (2024). *Laporan Deforestasi dan Krisis Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>
- Wijaya, S. (2025). Reclamation Politics in Jakarta. *Indonesia Journal*, 109(1).
- Yusup, M., & Sairi, M. (2024). Kerusakan lingkungan hidup dalam pandangan Islam dan Katolik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 40977–40984. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/40977>